

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pembangunan dilaksanakan secara terus menerus oleh suatu bangsa yang merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan eksploitasi sumber daya yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing yaitu melalui kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Kusuma, 2016). Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah (Arsyad, 2010).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan program pemerintah yang dilaksanakan secara sentralistik.

Menurut Anazodo et al. (2016) adanya desentralisasi atau pemberian otonomi akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu mendorong setiap daerah untuk menjadi mandiri utamanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Potensi daerah merupakan sesuatu yang sebenarnya telah ada, namun belum diidentifikasi, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu untuk memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukannya manajemen pendapatan supaya setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan pendapatan untuk membiayai kegiatan publiknya (Halim dan Iqbal, 2012:27). Potensi daerah jika mampu dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU Nomor 32 Tahun 2004). Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yang meningkat menunjukkan bahwa proporsi modal untuk menyelenggarakan pembangunan daerah juga meningkat, hal tersebut menandakan bahwa adanya partisipasi dari masyarakat terhadap jalannya pemerintah di daerah. Tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah perolehan atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat.

PDRB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di daerah atau provinsi dalam waktu tertentu (satu tahun). PDRB terbagi menjadi dua yaitu PDRB atas dasar konstan dan PDRB harga berlaku. Perbandingan PDRB antar kabupaten/kota dalam satu kawasan menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat pertumbuhan

ekonomi antar daerah dengan ciri-ciri adanya kesenjangan regional dalam satu kawasan (Puspitawati, 2013).

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota kabupaten di Lubuk Basung dengan sebagian besar penduduknya bersuku minangkabau dengan filsafah adat, pola pikir, tatanan budaya serta norma yang khas. Lubuk Basung berjarak lebih kurang 114 km dari Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang). Kabupaten Agam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di sebelah utara, Kabupaten 50 Kota di sebelah timur, Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar di sebelah selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Pada wilayah timur Kabupaten Agam, melingkupi wilayah Kota Bukittinggi, yang dulunya merupakan Ibukota Kabupaten Agam.

Luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.232,30 Km² atau 5,29% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.297,30 Km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Palembayan yang memiliki luas wilayah 349.77 KM² dan Kecamatan terkecil adalah Banuhampu dengan luas wilayah 28.48 Km². Kondisi geografis Kabupaten Agam terbentang mulai dari ketinggian 0 hingga 2.877 Meter di atas permukaan laut. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam tahun 2021 kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 529.138 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,50 %.

PDRB Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah dari tahun 1989 sampai 1999 terdiri dari sembilan sektor yaitu: (1) Sektor Pertanian (2) Sektor Pertambangan dan Pengalihan (3) Sektor Industri Pengolahan (4) Sektor Listrik, Gas dan Air (5) Sektor

Bangunan (6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan (9) Sektor Jasa-jasa.

Tabel 1.1

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan 1983-1993 Tahun 1989-1999
Menurut Lapangan Usaha (Dalam Persen)**

No	Lapangan Usaha	Sebelum Otonomi Daerah										
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	2,7	2,67	4,75	5,31	6,56	7,71	4,94	7,77	1,4	-4,6	2,35
2	Pertambangan dan Penggalian	20,8	4,06	5,18	5,04	11,9	26	6,57	7,6	6,37	-13	0,46
3	Industri Pengolahan	7,77	3,4	5,12	7,86	9,76	6,8	10,3	6,84	6,36	-3,5	1,42
4	Listrik, Gas dan Air	13,1	13,6	14,1	4,13	11	21,9	15,2	13,3	16,6	11,3	8,21
5	Bangunan	-11	6,11	7,71	10,8	11,7	4,04	8,01	8,48	4,68	-22	-9,5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,28	4,3	5,28	6,93	6,02	5,76	6,97	6,96	5,72	-1,9	2,46
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,07	3,34	4,46	1,24	15,7	8,52	9,59	8,74	6,3	-4,1	2,98
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan	2,7	1,32	5,98	6,55	5,36	9,46	3,59	5,19	4,47	-6,2	-1,7
9	Jasa-jasa	5,42	3,03	6,31	7,27	9,16	3,62	12,7	0,87	3,94	3,57	2,02
PDRB		3,96	3,38	5,29	6,11	7,57	7,45	7,82	6,5	4,34	-4,1	1,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Agam Dalam Angka, 1989-1999

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Sebelum Otonomi Daerah dari tahun 1989 sampai tahun 1999 yang terdiri dari 9 sektor. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam dari tahun 1989 sampai 1999 jika dilihat dari rata-rata mengalami peningkatan namun pada tahun 1989 pertumbuhan sektor pembangunan kontraksi – 11 persen. Ditambah lagi dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam yang mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998 dengan laju PDRB yang mengalami kontraksi sebesar -4,11 persen dan pada tahun 1999 juga mengalami kontraksi pada sektor Bangunan sebesar -9,55 persen kemudian pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan yakni sebesar -1,65 persen. Penurunan PDRB ini merupakan imbas dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dimana PDRB yang terdiri dari sektor-sektor mengalami perlambatan serta penurunan yang sangat tajam. Jika dilihat secara spesifik, pada tahun 1994 sektor Listrik, Gas dan Air mengalami pertumbuhan yang tinggi yakni 21,9 persen.

Secara spesifik jika dilihat dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 1996 sebesar 7,77 persen. Pada Pertambangan dan Penggalan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1989 sebesar 20,8 persen. Pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Jasa-jasa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 10,3 persen, 6,97 persen dan 12,7 persen. pada sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan pertumbuhan tertinggi tahun 1994 sebesar 21,9 persen dan 9,46 persen. kemudian pada sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi pertumbuhan tertinggi pada tahun 1993 sebesar 11,7 persen dan 15,7 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha (Dalam Persen), Tahun 2000-2010

No	Lapangan Usaha	Sesudah Otonomi Daerah										
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	3,6	4,91	7,18	8,48	9,25	8,65	8,69	8,85	8,04	5,45	4,10
2	Pertambangan dan Penggalian	1,51	1,89	2,74	2,31	5,54	5,11	5,18	6,08	7,26	3,30	7,16
3	Industri Pengolahan	4,15	3,63	3,11	2,8	3,16	4,23	4,25	4,28	4,35	4,25	4,55
4	Listrik, Gas dan Air	15,2	18,0	14,9	3,98	6,15	7,02	7,16	7,19	2,14	6,09	2,20
5	Bangunan	1,79	2,25	2,83	2,29	4,41	5,15	5,17	5,18	6,01	7,58	17,6
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,71	3,65	4,40	5,16	5,29	6,23	6,22	6,35	6,90	3,15	5,06
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,65	9,96	4,60	5,31	6,37	4,04	4,44	5,19	6,12	7,00	9,06
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan	1,64	2,59	7,49	5,09	6,96	4,59	4,84	4,81	6,01	4,44	4,30
9	Jasa-jasa	2,63	2,9	2,22	3,29	3,13	3,85	3,61	3,63	3,75	5,35	6,83
PDRB		3,55	4,06	4,75	5,29	6,01	6,13	6,18	6,37	6,35	4,92	5,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Agam Dalam Angka, 2000- 2010

Berdasarkan tabel 1.2 menggambarkan perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Sesudah Otonomi Daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2010 yang terdiri dari 9 sektor. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam dari tahun 2000 sampai dengan 2010 jika dilihat dari rata-rata mengalami peningkatan dan jika dilihat secara spesifik pertumbuhan tertinggi tahun 2001 pada sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 18.0 persen.

Jika dilihat dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2004 sebesar 9,25 persen sedangkan pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 7,26 persen dan 6,90 persen. Pada sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan dan sektor Jasa-jasa Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 4,55 persen, 17,6 persen dan 6, 83 persen. pada sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Pengangkutan dan Komunikasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 18.0 persen dan 9.96 persen. Pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa-Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2002 sebesar 7,49 persen.

Kehadiran undang-undang UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menciptakan proses demokratisasi bagi daerah untuk pengambil keputusan dan menggali sumber pendapatan sendiri. Sehingga otonomi daerah diberlakukan tahun 2000. Berdasarkan PDRB rata-rata tahun 2000 sampai dengan 2007 terlihat jelas pertumbuhan meningkat signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,37 persen. Perlambatan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 4,92 persen.

Pada otonomi daerah tahun dasar 2010 PDRB Kabupaten Agam bertambah 8 sektor mulai dari tahun 2011 sehingga Kabupaten Agam terdiri dari 17 sektor yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan, perikanan (2) pertambangan dan penggalian (3) industri pengolahan (4) pengadaan listrik dan gas (5) pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (6) konstruksi (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (8) transportasi dan pergudangan (9) penyediaan akomodasi dan makan minum (10) informasi dan komunikasi (11) jasa keuangan dan asuransi (12) real estat (13) jasa perusahaan (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (15) jasa pendidikan (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17) jasa lainnya.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010 . perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *Sistem of National Account* (SNA, 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan bersamaan dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menjaga konsistensi hasil perhitungan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 14,61 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,41 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Agam mengalami kontraksi ekonomi sekitar -1,38 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam persen) 2011-2020

NO	Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	2,86	4,23	5,39	4,98	3,61	3,91	3,75	2,05	1,03
2	Pertambangan dan Penggalian	4,84	6,24	5,51	5,32	5,19	7,66	0,11	2,17	1,15	-3,33
3	Industri Pengolahan	5,56	6,95	5,54	4,97	3,11	3,20	3,90	1,58	-1,58	-4,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	5,66	1,81	15,16	5,05	10,66	7,03	7,01	4,33	-7,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,06	2,86	4,63	4,64	4,27	5,21	6,02	5,02	7,44	0,46
6	Konstruksi	6,77	7,55	8,02	7,92	6,92	8,30	9,53	8,07	8,99	-5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,49	9,36	7,15	6,00	6,07	5,17	5,46	5,86	6,88	-1,97
8	Transportasi dan Pergudangan	9,01	9,34	10,53	7,75	8,50	9,81	9,05	9,40	8,96	-11,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,42	4,63	5,07	4,61	5,70	7,55	10,06	7,46	5,91	-19,7
10	Informasi dan Komunikasi	9,76	11,59	10,64	9,20	8,05	9,23	10,22	9,66	11,33	8,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,97	9,15	6,83	4,62	3,52	7,32	-3,04	1,15	2,70	0,76
12	Real Estate	4,54	4,78	4,6	5,40	5,20	4,72	4,97	5,32	6,23	0,03
13	Jasa Perusahaan	5,67	4,95	4,3	4,97	5,59	6,62	6,19	4,84	6,15	-4,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,51	2,09	2,61	2,89	3,24	5,3	5,33	6,07	6,73	-2,15
15	Jasa Pendidikan	7,78	7,27	8,55	6,24	7,22	9,38	8,18	8,36	9,40	5,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	9,43	8,76	8,97	7,51	5,3	8,92	7,81	5,61	8,24
17	Jasa lainnya	6,64	7,41	6,3	6,52	8,68	9,93	8,05	8,15	9,60	-11,4
	PDRB	6,01	6,18	6,15	5,92	5,52	5,51	5,44	5,27	4,81	-1,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Agam Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 kita dapat melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2011-2020. Pada tahun 2011 sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan yang tertinggi sebesar 9,51 persen dan 9,65 persen. Pada tahun 2012 sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki pertumbuhan yang tertinggi sebesar 6,95 persen, 9,36 persen, 11,59 persen dan 9,15 persen. Pada sektor Transportasi dan Pergudangan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 10,53 persen. Pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 5,39 persen dan 15,16 persen. Pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Lainnya terjadi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7,66 persen, 6,62 persen dan 9,93 persen. Pada sektor Konstruksi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 9,53 persen dan 10,06 persen. Pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Real Estat dan sektor Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 7,44 persen, 6,23 persen, 9,4 persen .

Dilihat dari rata-rata PDRB dari tahun 2011 sampai tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan PDRB dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,38 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan ini murni disebabkan oleh berkurangnya produksi diseluruh lapangan usaha karena terbatasnya aktivitas ekonomi selama pandemi Covid 19, tidak ada pengaruhnya oleh inflasi.

Berdasarkan uraian diatas, apakah sektor unggulan di Kabupaten Agam baik sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dikaji lebih rinci. Sehingga kegiatan sektoral di Kabupaten Agam dapat diketahui serta untuk mengetahui sektor mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah. Serta mengidentifikasi apakah telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Agam pasca terjadinya otonomi daerah, dimana hal ini bisa dijadikan acuan apakah kebijakan otonomi daerah yang terjadi di Kabupaten Agam berhasil atau tidak.

Setelah mengetahui hal tersebut maka penyusunan perencanaan pembangunan serta pertumbuhan diharapkan lebih terarah dan tepat sasaran guna terciptanya pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Agam. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Di Kabupaten Agam Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah”**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan 9 sektor dan 17 sektor?
2. Bagaimanakah pertumbuhan dan kontribusi sektor yang potensial di Kabupaten Agam?
3. Bagaimanakah perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan 9 sektor dan 17 sektor?

1. 3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis sektor potensi unggulan di Kabupaten Agam yaitu:

1. Untuk menganalisis sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan 9 sektor dan 17 sektor.
2. Untuk menganalisis pertumbuhan dan kontribusi sektor yang potensial di Kabupaten Agam.
3. Untuk menganalisis perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan 9 sektor dan 17 sektor

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan tentang potensi ekonomi sektoral sebelum dan sesudah otonomi daerah yang ada di Kabupaten Agam dan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian.
2. Bagi pemerintah, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam.
3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis dalam bidang ekonomi regional dan wilayah tentang potensi ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Agam.